



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI YANG BERBENTUK BUMN/BUMD
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

RIZAL JAMALUDIN

1520922069

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI YANG BERBENTUK BUMN/BUMD
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

RIZAL JAMALUDIN

1520922069

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Rizal Jamaludin
NRP : 1520922069
Tanggal : 20 Januari 2018

Jakarta, 20 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Rizal Jamaludin

::

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizal Jamaludin
NRP : 1520922069
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG BERBENTUK BUMN/BUMD DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2018

Yang menyatakan



Rizal Jamaludin

...

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

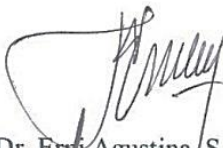
Nama : Rizal Jamaludin

NRP : 1520922069


Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI YANG BERBENTUK BUMN/BUMD
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

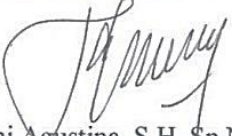
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ketua Penguji


Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum
Penguji I // Pembimbing


Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn
Penguji II/ Pembimbing


Dr. Desy Yasy Tarina, S.H., M.H.
Dean


Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ka. Prodi


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Januari 2018

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG BERBENTUK BUMN/BUMD DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

RIZAL JAMALUDIN

ABSTRAK

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agenya, yang dikenal dengan istilah “actus reus” yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya. Besarnya nilai proyek pada BUMN/BUMD akan berdampak pada kejahatan korporasi telah banyak merugikan masyarakat, dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi kebanyakan berskala besar dan korban yang lebih banyak. Kejahatan pada BUMN/BUMD pada umumnya adalah tindak pidana korporasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD? 2. Bagaimana realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD. 2. Menganalisis bentuk realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD. Dengan metode penelitian yuridis dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD dapat dijatuhkan pidana pengganti. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya atau orang lain yang terkait dengan korporasi. Sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, dapat saja dijatuhkan hakim, tapi terbatas pada perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD sebagai berikut: a. Realisasi yaitu dalam kasus korupsi maskapai Garuda Indonesia, kasus korupsi proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, proyek pembangunan Dermaga Sabang pada kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang dan dalam kasus korupsi KTP-elektronik. 3. Hambatan yaitu pertama konsep pemikiran dalam UUPTPK, sebagian besar merupakan konsep pemikiran KUHPidana, karena konsep pemikiran yang terkandung dalam KUHPidana hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum, tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Solusi adalah diatur tata cara dan prosedur penanganannya dalam hukum acara pidana yang mendatang, ketika korporasi sebagai subjek hukum pidana dan melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Korupsi

JURIDICAL REVIEW OF CORPORATE LIABILITY IN THE FORM OF BUMN / BUMD IN CORRUPTION CRIME

RIZAL JAMALUDIN

ABSTRACT

Corporations can be held accountable of what their agents have done, known as "actus reus" which means that the act done must be within the scope of his power. The magnitude of the project value of state-owned enterprises / BUMDs will have an impact on corporate crime, which has caused much harm to the public, due to the crimes committed by large-scale corporations and the greater number of victims. Crime on BUMN / BUMD in general is a corporate crime. Problems in this research are 1. How to form of criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD? 2. How is the realization, obstacles and solutions in the criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD? The purpose of this study is 1. To analyze the form of criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD. 2. Analyzing the form of realization, obstacles and solutions in the criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD. With juridical research method can be concluded that 1. The form of criminal responsibility in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD can be imposed a criminal substitute. If a criminal act of corruption is committed in the name of a corporation, then a criminal penalty may be imposed on the corporation or its management or any other person in connection with the corporation. Additional criminal sanctions as stipulated in Article 18 paragraph (1) a and b, may be imposed by a judge, but limited to the seizure of tangible or intangible goods or immovable property and the payment of substitute money as much as the proceeds of a criminal act of corruption. Realization, obstacles and solutions in the criminal liability in a corporate crime in the form of BUMN / BUMD as follows: a. The realization is in the case of Garuda Indonesia airline corruption, corruption case of procurement project of Center for Education, Training and School of National Sports (P3SON) Hambalang, Sabang Port development project at Sabang Free Port and Trade area and in case of electronic ID card corruption. 3. Obstacles namely the first concept of thought in UUPTPK, most of the concept of KUHP thought, because the concept of thought contained in the Criminal Code only know humans as legal subjects, do not know the corporation as a legal subject. Solutions are governed by procedures and procedures for handling them in the upcoming criminal procedural law, when the corporation is subject to criminal law and commits a crime.

Keywords : Accountability, Corporations, Corruption

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG BERBENTUK BUMN/BUMD DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI’

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
5. Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn, selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 20 Januari 2018

Rizal Jamaludin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1.Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	7
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	7
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
I.5.1. Kerangka Teoritis	8
I.5.2. Kerangka Konseptual	23
I.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	26
II.1.Korporasi.....	26
II.1.1. Sejarah Lahirnya Korporasi	26
II.1.2. Pengertian Korporasi.....	26
II.1.3. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	29
II.1.4. Sanksi Pada Korporasi	37
II.2.Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi	39
II.2.1. Pengertian Tindak pidana.....	39
II.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
II.2.3. Pandangan Pakar Hukum terhadap Perbuatan Pidana.....	43
II.2.4. Tindak Pidana Korporasi.....	50
II.2.5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	51
II.3.Tindak Pidana Korupsi.....	69

II.3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	69
II.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	74
II.3.3. Sebab-sebab Korupsi.....	75
II.3.4. Akibat-Akibat Korupsi.....	77
II.3.5. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	79
II.4. <i>Doktrin Business Judgement Rule</i>	85

BAB III. METODE PENELITIAN.....

III.1. Tipe Penelitian	89
III.2. Sifat Penelitian	90
III.3. Sumber Data.....	91
III.4. Metode Pengumpul Data.....	93
III.5. Metode Analisis data.....	93

**BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU
KEJAHATAN KORPORASI..... 94**

IV.1. Gambaran Umum BUMN dan BUMD.....	94
IV.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi Berbentuk BUMN/BUMD.....	98
IV.3. Realisasi, Hambatan dan Solusi Dalam Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi Berbentuk BUMN dan BUMD	112

BAB V. PENUTUP..... 118

V.1. Kesimpulan	118
V.2. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP